



**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG  
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI  
SUMATERA BARAT**

**(Studi Kasus Putusan PK No.749PK/Pdt/2011)**

**TESIS**

**YANAIRO VIONIER**

**1310922005**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
2015**



**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG  
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI  
SUMATERA BARAT**

**(Studi Kasus Putusan PK No.749PK/Pdt/2011)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**YANAIRO VIONIER  
1310922005**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
2015**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yanairo Vionier

NRP : 1310922005

Tanggal : .....

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, .....  
12 November 2015

Yang menyatakan,



(Yanairo Vionier)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yanairo Vionier

NRP : 1310922005

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI SUMATERA BARAT(Studi Kasus Putusan PK No.749PK/Pdt/2011).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 November 2015

Yang menyatakan,

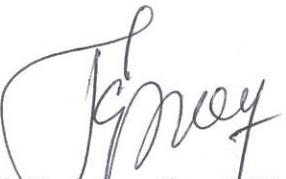


(Yanairo Vionier)

## PENGESAHAN

Tesis diajukan Oleh : Yanairo Vionier  
NRP : 1310922005  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria Di Sumatera Barat (Studi Kasus  
Putusan PK No.749PK/Pdt/2011)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 28 Oktober 2015 dan diterima sebagai bagian Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

  
Dr. Hj. Erm Agustina, S.H.,Sp.N  
Ketua Penguji

  
Dr.Dra.Hj.Laily Washliati,S.H.,M.Hum.  
Penguji Ahli

  
Prof.Dr.Jeane Neltje Saly, S.H, M.H. APU  
Pembimbing I

  
Dr. Erna Widjajati, S.H., M.H.  
Pembimbing II

  
Dr. Hj. Erm Agustina, S.H.,Sp.N  
Ka.Prodi



Dr. Iwan Kresna Setiadi, S.E., M.M.  
Direktur

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 12 November 2015

**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG  
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI  
SUMATERA BARAT**  
**(Studi Kasus Putusan PK No.749PK/Pdt/2011)**

**Yanairo Vionier**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana manfaat pengaturan UU No.5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dalam kaitan dengan hukum adat Minangkabau dan bagaimana implementasi proses beralihnya tanah ulayat menjadi hak-hak lain sesuai dengan UU No.5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, serta mengapa terjadinya sengketa antara suku Tanjung Manggopoh dengan PT.Mutiara Agam dan PT.Minang Agro. Hal ini disebabkan karena tanah ulayat di Minangkabau pada umumnya tidak ada bukti kepemilikan secara tertulis, hanya pengakuan dari sesama masyarakat hukum adat, yang menjadi dasar kepemilikan tanah ulayat, sehingga menimbulkan sengketa antara suku Tanjung Manggopoh dengan PT.Mutiara Agam dan PT.Minang Agro. Dari hasil penelitian diperoleh bukti-buktii bahwa pelepasan hak kepada PT.Mutiara Agam dan PT.Minang Agro sudah sesuai dengan proses adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Tiku V Jorong, sehingga diterbitkan sertifikat HGU no.4 oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama PT.Mutiara Agam, akan tetapi suku Tanjung Manggopoh mengklaim bahwa tanah dengan sertifikat HGU No.4 atas nama PT.Mutiara Agam adalah sebagai ulayatnya, yang disebabkan akibat tidak adanya batas yang jelas dalam penguasaan tanah ulayat. Kesimpulan tesis ini menyatakan bahwa untuk mewujudkan kehendak perundang-undangan bagi tanah ulayat di Minangkabau secara umum diatur dalam pasal 3, 5, dan pasal 56 UUPA, sehingga di Minangkabau dapat didaftarkan menjadi sesuatu hak dengan melalui dua tingkat proses yaitu sesuai hak adat dan UUPA itu sendiri, proses melalui hukum adat ,dimana cucu kemenakan membuat surat penguasaan fisik atas tanah yang akan didaftarkan haknya dan mendapat persetujuan dari Mamak Kepala Waris.

**Kata Kunci :** Tanah Ulayat, Pelepasan Hak dan Sengketa, Hukum Adat

**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG  
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI  
SUMATERA BARAT**  
**(Studi Kasus Putusan PK No.749PK/Pdt/2011)**

**Yanairo Vionier**

**Abstract**

The study was conducted to know the solution about how the benefits of arrangement the Law No.5/1960 on the basic agrarian principles in relation to customary law of Minangkabau and how the implementation process of transfer of communal land into other rights in accordance with the Law No.5/1960 on the basic agrarian principles, and what the reason of disputes between Tanjung Manggopoh, PT.Mutiara Agam, and PT.Minang Agro. This is due to the communal land in Minangkabau, generally, there is no proof of ownership in writing, only the acknowledgment of fellow communities of customary law, which became the basis of communal land ownership, giving rise to disputes between Tanjung Manggopoh, PT.Mutiara Agam, and PT.Minang Agro. The result were obtained evidence that the waiver to PT.Mutiara Agam and PT.Minang Agro is in conformity with the customary process carried out by customary law community Tiku V Jorong, so HGU no.4 certificate issued by BPN on behalf PT.Mutiara Agam, but Tanjung Manggopoh claims that the land concession certificates on behalf PT.Mutiara Agam is their customary land, the changes are application, due to the absence of clear boundaries in tenure of the communal land. The conclusion of this thesis states that to realize the will of the legislation for communal land in Minangkabau are generally set forth in article 3, 5, and article 56 of the UUPA, so in Minangkabau, communal land can be registered to be something right out of the process according to customary rights, grandson and nephew make a physical mastery on the ground that their rights will be registered and approved by Mamak Kepala Waris.

**Keywords :** Communal Land, Waiver and Dispute, Customary Law

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Pengajuan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister ilmu hukum. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Kedudukan Tanah Ulayat dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Sumatera Barat (Studi Kasus Putusan PK No.749PK/Pdt/2011)*.

Proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc, Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Erni Agustina, S.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sekaligus Ketua Pengaji yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis baik selama masa pendidikan maupun dalam hal penyelesaian tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU selaku Pembimbing I dan pengajar yang tanpa lelah memberikan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Erna Widjajati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dan pengajar yang telah memberikan koreksian-koreksian dan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, S.H., M.Hum., selaku Pengaji Ahli dan pengajar yang tanpa lelah memberikan masukan serta koreksian kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kakak Ipar, Bapak Awaluddin Rusman, S.H., yang telah banyak membantu Penulis dalam mendapatkan dokumen-dokumen pendukung pada penulisan

tesis ini serta membantu Penulis dalam berdiskusi mengenai tema yang Penulis angkat dalam tesis ini.

7. Kakanda tercinta, Souvenir, yang tidak luput membantu Penulis, bahkan dalam hal kecil sekalipun.
8. Ananda Veggy Yustisiandina, S.Hum., putri Penulis yang banyak membantu hal-hal teknis dalam penulisan tesis ini, sekaligus sebagai penyemangat Penulis dalam melanjutkan pendidikan, dan menyelesaikan tesis ini.
9. Ananda Anggi Liviani Viducia, putri Penulis yang masih berjuang dalam kegiatan Koas nya, sosok yang juga menjadi penyemangat Penulis dalam melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan tesis ini.
10. Ananda Silvia Septriana, S.H., keponakan Penulis yang turut serta membantu mengumpulkan dokumen pendukung dalam penyelesaian tesis ini.
11. Keluarga besar Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga Penulis haturkan kepada seluruh sahabat dan rekan-rekan yang memberikan motivasi sejak awal perkuliahan, serta turut membantu seluruh rangkaian proses penulisan hingga akhirnya Penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Serta seluruh pihak-pihak yang membantu Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk membantu menyempurnakan dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam tesis ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Hormat Penulis,

Yanairo Vionier

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	9
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	9
I.4 Tujuan Penelitian .....	10
I.5 Manfaat Penelitian .....	10
I.6 Kerangka Pemikiran .....	11
I.7 Sistematika Penulisan .....	18
BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....	19
II.1 Teori Hukum Roscoe Pound .....	19
II.2 Sistem Hukum Lawrence M.Friedman .....	21
II.3 Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, dan Kedudukannya Dalam UUPA .....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	27
III.1 Metode Pendekatan .....	27
III.2 Spesifikasi Penelitian .....	27
III.3 Sumber Badan Hukum .....	28
III.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	29
III.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	29
III.6 Teknik Penyajian Bahan Hukum .....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
IV.1 Manfaat Pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dalam Kaitannya Dengan Hukum Adat Minangkabau.....	30
IV.2 Implementasi Proses Beralihnya Tanah Ulayat Menjadi Hak-Hak Lain Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	38
IV.3 Terjadinya Sengketa Antara Suku Tanjung Manggopoh Dengan PT.Mutiara Agam Dan PT.Minang Agro .....	85

BAB V PENUTUP.....	94
V.1 Kesimpulan .....	94
V.2 Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	97
RIWAYAT HIDUP	